

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DILIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG

Noor Azizah Zahratunnissa Al Farabi*; Muhammad Taupik
Noorazizah0102@gmail.com ; taupikuzumaky5@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olahraga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong
Telp/Fax (0526) 2022484 Kode Pos 7012
info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah pelaksanaan suatu kebijakan dalam suatu sistem berbasis web yang didasarkan pada prosedur-prosedur dan pakaian khusus standardisasi. Untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien, layanan komputerisasi sangat diperlukan dalam mendukung administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan baik dengan menerapkan atau menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data di peroleh dari hasil wawancara dan data dokumen atau arsip dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Key Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Teknik Analisis yang digunakan adalah teori Matthew B Milles yaitu Seleksi Data ,Kondensasi Data , Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Terimplementasi.

Kata Kunci : Implementasi, SIAK, Informasi Kependudukan

IMPLEMENTATION OF THE POPULATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM (SIAK) POLICY VIEWED FROM THE RESOURCE ASPECT AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF TABALONG REGENCY

ABSTRACT

The implementation of the Population Administration Information System (SIAK) is the execution of a policy within a web-based system, which is grounded in standardized procedures and protocols. To provide effective and efficient services, computerized systems are essential in supporting population administration, thereby improving the quality of services offered through the application or use of the population administration information system. The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) policy from the perspective of resources at the Department of Population and Civil Registration of Tabalong Regency. The research method employed is descriptive qualitative. Data sources were obtained from interviews and document or archival data from the Department of Population and Civil Registration of Tabalong Regency. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The key informants in this study consisted of five individuals. The analysis technique applied is based on Matthew B. Miles' theory, which involves data selection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Based on the findings of this research, it can be concluded that the implementation of the Population Administration

Information System (SIAK) policy at the Department of Population and Civil Registration of Tabalong Regency has been successfully implemented.

Keywords: *Implementation, SIAK, Population Information*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan hak otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah/kota mendapatkan kewenangan tentang urusan kependudukan. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu ketersediaan data penduduk di semua tingkat administrasi pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tidak merata, serta rendahnya kualitas SDM menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan peningkatan SDM yang tinggi mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kependudukan diantaranya desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan yang dilakukan kan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hampir semua negara-negara maju menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berarti semua proses dapat diakses dengan cepat, sistem

layanan tersebut dikenal dengan electronic Government atau disingkat dengan E-Government.

E-Government pada hakikatnya nya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membentuk jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraannya E-Government mengacu pada dua hal yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan. Istilah E-Government masuk dalam ranah pemerintahan di Indonesia seiring dengan dikeluarkannya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional

Penerapan dan penggunaan E-Government di Indonesia sendiri salah satunya dengan membuat sistem informasi dalam pengelolaan data kependudukan oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah membuat sebuah kebijakan sebagai langkah untuk membantu pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan yaitu dengan mengadakan program yang dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dengan maksud memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, melalui jaringan komunikasi dan informasi aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan pengelolaan data kependudukan. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) ini

diterapkan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, terutama dinas terkait dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas terkait mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dengan kecamatan dan kelurahan setempat.

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sejak Tahun 2012, dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kabupaten Tabalong. Database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Tabalong serta dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan. Terdapat tiga komponen dalam aplikasi ini yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Dari kegiatan pendaftaran penduduk diterbitkan 3 dokumen yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ada dari komponen pencatatan sipil terdapat 4 peristiwa penting yang harus dilaporkan di antaranya kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, sedangkan dari komponen pengelolaan informasi kependudukan sebagai media/alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang pengembangan penduduk.

Berdasarkan observasi sementara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, jika dilihat dari aspek komunikasi sudah baik, hal ini terlihat dari tersampainya informasi kepada masyarakat, kemudian dari aspek disposisi juga sudah terlaksana dengan baik, dan dari aspek struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional, namun dari aspek sumber daya berdasarkan peninjauan awal belum optimal. Hal ini terlihat dari sumber daya dan operator yang belum optimal menjalankan sistem tersebut, karena staf yang kurang atau tenaga yang kurang, dan menambah karyawan yang berkualitas, selain itu kendala jaringan merupakan permasalahan utama karena aplikasi ini tidak dapat diakses jika jaringan tidak stabil. Dilihat dari fasilitas yang kurang memadai, setiap mengakses data dari kabupaten ke

desa atau sebaliknya dari desa ke kabupaten itu terlambat dan masih belum stabil, karena tidak mampu mengakses timbal balik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Dilihat dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong"

LANDASAN TEORI / KERANGKA TEORI

Penelitian terdahulu diambil dari jurnal penelitian yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti :

- a. (Adibowo, 2013) Melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu, Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan masih belum optimal hal ini disebabkan karena Sumber Daya yang dimiliki masih dalam tahap berkembang dan adanya kendala pada bagian pengoperasian komputer.
- b. (Jon Ferdi Pubra, 2019) Melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan masih belum optimal karena terdapat kendala dan belum memiliki peraturan khusus di kantor Kecamatan Kota Medan, serta menjadi aparat yang baik tidak hanya menjalankan administrasi kependudukan tetapi juga perlu memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan publik.
- c. (Tarifu, 2020) Melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari,

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan sudah optimal.

- d. (Stefanus Arwandi Jai, 2016) Melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah berjalan dengan baik, dan dibukanya loket Dispenduk di Kelurahan Tunggul Wulung sehingga semua keperluan administrasi kependudukan dapat dilayani di Kelurahan, meskipun terdapat hambatan dari implementasi program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diantaranya adalah pengiriman data yang dilakukan masih manual sehingga petugas harus mengirim berkas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
- e. (Lestari, 2016) Melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pocatatan Sipil Kota Manado, Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil di kota manado sudah berjalan dengan baik.

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 1997). Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan, Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

a. Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) Sikap para pelaksana, (6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Teori implementasi kebijakan yang bersifat *top down* dikembangkan oleh George C Edward III dalam menamakan model implementasi kebijakan publik nya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi.

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle

Model Merilee S.Grindle terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecahkan lagi menjadi beberapa item (Subarsono, 2005).

Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran

atau target group, termuat dalam isi kebijakan, (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan, (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor nya dengan rinci, (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan "kesulitan-kesulitan" dan kemungkinan-kemungkinan "kesempatan-kesempatan" dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2006). Thomas R. Dye (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Dalam hal ini, pokok kajiannya adalah negara. Yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan akan memiliki pengaruh atau dampak yang sama besarnya. Kebijakan publik ini bukan hanya keinginan pemerintah semata-mata tetapi ketika pemerintah melakukan suatu tindakan harus ada tujuan. Chandler dan Plano (2013:38) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dan pemerintah.

3. Pengertian Aplikasi

Menurut (Shelly et al., 2009) Aplikasi adalah seperangkat instruksi khusus dalam komputer

yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Menurut (Sutabri, 2012) Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Menurut (Pipin, 2013) Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Ms.World, Ms.Excel.

4. Pengertian Sistem

Menurut (Marimin, 2009), Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Menurut (Fatta, 2013), Definisi sistem dalam kamus Webster's Unbrigid adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Menurut (Jogiyanto, 2005) Suatu Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

5. Pengertian Sistem Informasi

Menurut (Kadir, 2003), Sistem Informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut (Sutabri, 2005) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang saling satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.

6. Pengertian Administrasi Kependudukan

Definisi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertipan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet. Sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. sesuai tentang dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 administrasi kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi

kependudukan di Indonesia. Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (population events) dan peristiwa penting (vital events) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

a. Indikator Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK)

Adapun indikator Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK) yaitu antara lain :

1. Database
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi
3. Sumber daya manusia
4. Pemegang hak akses
5. Lokasi database
6. Pengelolaan database
7. Pemeliharaan database
8. Pengamanan database
9. Pengawasan database;
10. Data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*)
11. Perangkat pendukung
12. Tempat pelayanan
13. Pusat data
14. Pusat data cadangan dan
15. Jaringan komunikasi data

Kerangka Konseptual

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah Peneliti 2023

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang telah dikemukakan di depan, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut (Martono, 2015), penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui Sumber data pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono, 2015). Contoh Data yang pokok/data primer itu seperti buku-buku dan literatur

2. Data Skunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian (Sugiyono, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, Pembicaraan tersebut dilakukan dengan cara yang terkontrol, terarah dan sistematis.

2. Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan bersifat non partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, namun hanya sebagai pengamat independent.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau

karya tulis akademik dan Seni yang telah ada, untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumen.

Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah dari para responden yang sekaligus berperan sebagai *key* informan. Adapun *key* informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala dinas : 1 orang
2. Kabid SIAK : 1 ORANG
3. Analisis SIAK : 1 orang
4. Staf Operator SIAK : 1 orang

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui penelitian analisis data yang dikembangkan (Matthew B. Miles, 2014) yang menggunakan metode analisis interaktif dengan prosedur yaitu :

1. Seleksi Data (*Data Collection*)

Seleksi data adalah proses pengumpulan, pengukuran dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama *data collection* adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis dan krusial.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, pengabstrakan, atau mentransformasikan data secara utuh yang diperoleh dari data lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

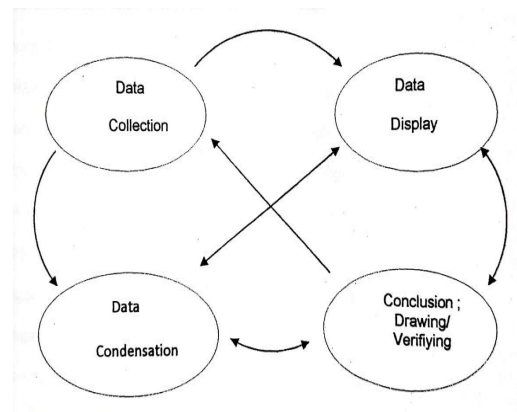
Secara umum penyajian data adalah sebuah bentuk kumpulan data yang terorganisir, informasi, yang memungkinkan menggambarkan kesimpulan dan tindakan.

Penyajian data adalah langkah utama yang kuat untuk menganalisis data secara kualitatif. Menyajikan data mencakup banyak jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang dapat diakses, sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ketahap selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini dimaksudkan, untuk menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya. Dengan penyajian data diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

Gambar 2: Prosedur digambarkan oleh Miles, Huberman, dan Saidana (2014).



Sumber : (Miles et al., 2014).

Untuk memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan maka penulis membuat kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1 : Kriteria Pengukuran

NO	KATEGORI	KRITERIA
1	Sangat Terimplementasi	Apabila 5 informan menjawab benar
2	Terimplementasi	Apabila 4 informan menjawab benar
3	Cukup Terimplementasi	Apabila 3 informan menjawab benar
4	Belum Terimplementasi	Apabila 2 informan menjawab benar
5	Tidak Terimplementasi	Apabila 1 informan menjawab benar

Sumber : Data diolah Peneliti 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. INDIKATOR STAF

Variabel	Dimensi	Indikator	Kategori	Kesimpulan
Implementasi Aplikasi SIAK Dilihat Dari Aspek Sumber Daya	Staf	Pendaftaran Penduduk	Sangat Terimplementasi	Terimplementasi
		Pencatatan Sipil	Terimplementasi	
		Pengelolaan Informasi Kependudukan	Sangat Terimplementasi	

Sumber : (Edward, 1980)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek Sumber daya yang dikemukakan oleh (Edward, 1980), dari indikator Staf terhadap pendaftaran penduduk (penerbitan NIK, KK, KTP), pencatatan sipil (pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), dan pengelolaan informasi kependudukan, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan **Terimplementasi**.

2. INDIKATOR INFORMASI

Variabel	Dimensi	Indikator	Kategori	Kesimpulan
Implementasi Aplikasi SIAK Dilihat Dari Aspek Sumber Daya	Informasi	Pendaftaran Penduduk	Sangat Terimplementasi	Cukup Terimplementasi
		Pencatatan Sipil	Terimplementasi	
		Pengelolaan Informasi Kependudukan	Belum Terimplementasi	

Sumber : (Edward, 1980)

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek Sumber daya yang dikemukakan oleh Edward III (2008), dari indikator informasi terhadap pendaftaran penduduk (penerbitan NIK, KK, KTP), pencatatan sipil (pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), dan pengelolaan informasi

kependudukan, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan **Cukup Terimplementasi**.

3. INDIKATOR WEWENANG

Variabel	Dimensi	Indikator	Kategori	Kesimpulan
Implementasi Aplikasi SIAK Dilihat Dari Aspek Sumber Daya	Wewenang	Pendaftaran Penduduk	Sangat Terimplementasi	Sangat Terimplementasi
		Pencatatan Sipil	Sangat Terimplementasi	
		Pengelolaan Informasi Kependudukan	Sangat Terimplementasi	

Sumber : (Edward, 1980)

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek Sumber daya yang dikemukakan oleh (Edward, 1980), dari indikator wewenang terhadap pendaftaran penduduk (penerbitan NIK, KK, KTP), pencatatan sipil (pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), dan pengelolaan informasi kependudukan, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan **Sangat Terimplementasi**.

4. INDIKATOR FASILITAS

Variabel	Dimensi	Indikator	Kategori	Kesimpulan
Implementasi Aplikasi SIAK Dilihat Dari Aspek Sumber Daya	Fasilitas	Pendaftaran Penduduk	Cukup Terimplementasi	Cukup Terimplementasi
		Pencatatan Sipil	Cukup Terimplementasi	
		Pengelolaan Informasi Kependudukan	Terimplementasi	

Sumber : (Edward, 1980)

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek Sumber daya yang dikemukakan oleh (Edward, 1980), dari indikator fasilitas terhadap pendaftaran penduduk (penerbitan NIK, KK, KTP), pencatatan sipil

(pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), dan pengelolaan informasi kependudukan, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan **Cukup Terimplementasi**.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

No	Indikator	Kategori
1	Staf	Terimplementasi
2	Informasi	Cukup Terimplementasi
3	Wewenang	Sangat Terimplementasi
4	Fasilitas	Cukup Terimplementasi

Sumber : (Edward, 1980)

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya, berdasarkan indikator staf dikategorikan terimplementasi, dari indikator informasi dikategorikan cukup terimplementasi, dari indikator wewenang dikategorikan sangat terimplementasi, dan dari indikator fasilitas dikategorikan cukup terimplementasi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dikategorikan **Terimplementasi**.

PEMBAHASAN

Dari hasil jawaban wawancara tersebut serta dari pengamatan penulis, maka penulis menyimpulkan atau membahas dengan dukungan teori Kebijakan Implementasi (Edward, 1980) dilihat dari aspek sumber daya yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisa Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.

Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang dikemukakan oleh (Edward, 1980), dari Indikator:

1. Staf

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya yang dikemukakan oleh (Edward, 1980) dari indikator Staf, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dikategorikan Sangat Terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima informan tentang staf dan hanya satu jawaban yang mengatakan kurang mengetahui kemampuan staf dalam mengakses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

2. Informasi

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator Informan, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian informan menjawab informasi dalam pencatatan sipil terutama pelaporan dalam peristiwa perceraian serta informasi tentang pengelolaan informasi kependudukan belum disampaikan dengan baik

3. Wewenang

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator Wewenang, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima orang informan tentang wewenang dan kelima informan menjawab bahwa sudah sesuai dengan wewenang untuk mengakses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4. Fasilitas

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari

aspek sumber daya yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator Fasilitas, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian informan menjawab fasilitas dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum terpenuhi, terutama kendala server pada saat penginputan data kependudukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilihat dari aspek sumber daya pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

SARAN

1. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), agar menjadi sangat terimplementasi dan lebih baik.
2. Dapat mempertahankan kemampuan staf dalam mengakses Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) dalam penginputan pendaftaran penduduk dan pengelolaan informasi kependudukan.
3. Dapat tetap memberikan informasi dengan baik dalam pendaftaran penduduk (penerbitan NIK, KK, dan KTP).
4. Dapat mempertahankan kesesuaian wewenang dalam mengakses Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan.
5. Dapat memberikan informasi dengan baik dalam pengelolaan informasi kependudukan Aplikasi System Informasi Kependudukan (SIAK)

DAFTAR PUSTAKA

- Adibowo, R. (2013). Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Indramayu. *JIPSI Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, UNIKOM, 1-18.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Fatta, H. Al. (2013). Analisis & Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern
- Jogiyanto. (2005). Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi : Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan (2nd ed.). Penerbit Andi
- Jon Ferdi Pubra, U. T. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif* 8.2, 77-83.
- Kadir, A. (2003). Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data.
- Lestari, F. D. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal UNSRAT, Administrasi Publik*, 50-88.
- Marimin. (2009). Teknologi Manajerial. IPB Press.
- Martono, N. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Rajagrafindo Persada
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Pipin, A. (2013). Kamus Teknologi Informasi. Perpustakaan Stikes Nani Hasanuddin.
- Shelly, Cashman, & Verman. (2009). *Discovering Computers*. Salemba Empat: Jakarta.
- Stefanus Arwandi Jai, D. S. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi

- Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 51.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Badung : Alfabeta .
- Sutabri. (2005). *Sistem Informasi Manajemen* . Yogyakarta : CV ANDI .
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi* . Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.
- Tarifu, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. *J. Publicuho*, 233.
- Wahab, S. A. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik* . Malang : UNIBRAW dan IKIP.